

# Dilema Wilayah Lumbung Ikan (Dari Konsumerisme Menuju Produktivitas)

Herman Oesman <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Dosen Departemen Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ternate. Indonesia,  
Email : hrmnsmn@gmail

✉ Korespondensi : Herman Oesman, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia,  
Email : hrmnsmn@gmail.com

## ABSTRAK

Maluku Utara memiliki produksi perikanan laut (tangkap) sebesar 286.629,486 ton, sementara potensi yang tersedia untuk perikanan tangkap, mengikuti data lama, sebesar 1.035.230 ton per tahun, di mana potensi lestari sebesar 517.000 ton per tahun, dari potensi tersebut yang baru dimanfaatkan sebesar 150.232 ton per tahun atau 29%. Dengan potensi sebesar itu, ternyata belum memberikan hasil maksimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan Maluku Utara. Tidak hanya itu, potensi besar itu juga belum banyak menyumbang bagi pembangunan daerah. Persoalan perikanan di Maluku Utara yang dikenal sebagai wilayah dengan produksi ikan terbesar, akhirnya tungkus dalam wacana, mengalami "involusi" yang dari waktu ke waktu, baik publik maupun pemerintah berada dalam wacana itu, tanpa memberi efek kejut bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan Maluku Utara. Tulisan ini tidak membahas persoalan perikanan *an sich*, tetapi lebih pada perspektif sosiologi dan budaya mengenai Maluku Utara sebagai wilayah penghasil ikan yang diperhitungkan, Mimpi dan cita-cita besar menjadikan Maluku Utara sebagai lumbung ikan bukan tidak mungkin dapat tercapai, apabila pemerintah dapat hadir untuk memberi "kepastian kebijakan dan tindakan" dengan menyiapkan infrastruktur pendukung yang memadai, dapat hadir ketika masyarakat membutuhkan peran dan "campur tangan" untuk mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik. Karena itu, pelembagaan pada tingkat komunitas nelayan merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Hal yang paling penting adalah, menggeser kesadaran untuk menjadikan ikan sebagai komoditi utama, dan tidak sekadar hanya sebagai pelengkap untuk dikonsumsi. Kesadaran ini harus konsisten dijalankan, dan itu harus dimulai dari pemerintah daerah sebagai titik tolak hendak mengembangkan Maluku Utara sebagai wilayah lumbung ikan yang disegani dan dihormati.

**Keyword:** *Lumbung Ikan, Konsumerisme, Produktivitas, Ternate*

## I. PENDAHULUAN

Persoalan perikanan di Maluku Utara (termasuk di Indonesia) yang dikenal sebagai wilayah dengan produksi ikan terbesar, akhirnya tungkus dalam wacana, mengalami "involusi" yang dari waktu ke waktu, baik publik maupun pemerintah berada dalam wacana itu, tanpa memberi efek kejut bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan Maluku Utara. Tulisan ini tidak membahas persoalan perikanan *an sich*, tetapi lebih pada perspektif sosiologi dan budaya mengenai Maluku Utara sebagai wilayah penghasil ikan yang diperhitungkan, di tengah tingginya konsumerisme masyarakat tetapi minim produktivitas.

Maluku Utara pernah menjadi pusat tarikan wacana paling mutakhir tentang Lumbung Ikan Nasional (LIN), yang hingga hari ini, wacana itu masih terus disuarakan (?). Beberapa alasan yang mengimpit tentang wacana lumbung ikan, *pertama*, persoalan lumbung ikan merupakan persoalan kebijakan pemerintah bidang kelautan dan perikanan. Ketika menjadi isu nasional, ramai-ramai beberapa daerah yang dikenal sebagai daerah kepulauan kemudian menangkap isu itu sebagai "peluang" untuk memperoleh "kue pembangunan" bidang kelautan dan perikanan yang memang secara nasional melalui kebijakan Presiden diarahkan pada pengembangan *branding* Indonesia bidang kelautan/kemaritiman yang selama ini kurang menjadi perhatian serius.

Kita pun tahu, Provinsi Maluku Utara lalu kemudian memasuki "pusaran" isu tersebut. Di mana sebelumnya, Provinsi Maluku juga melakukan hal yang sama. Namun dalam perkembangan

selanjutnya, Provinsi Maluku tidak lagi berada pada level wacana, sebaliknya, provinsi ini justru telah berada pada level kebijakan dan aksi.<sup>1</sup> Sedangkan Provinsi Maluku Utara, potensi perikanan masih mencari bentuk dan berkuat pada persoalan wacana. Berbagai kegiatan berupa workshop/seminar tentang LIN telah dilaksanakan di tahun 2015 lalu, sementara kebijakan dan aksi masih belum terasa kuat pengaruhnya. Walau kemudian, telah “dibentuk” Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) Maluku Utara untuk menopang program LIN ini.

*Kedua*, ini yang teramat penting, persoalan perikanan dengan potensi kelautan yang demikian berlimpah dan telah menjadi kekayaan tradisi masyarakat Maluku Utara justru belum ditemukan benang merah menjadi nilai ekonomi yang produktif. Bagaimana kultur/tradisi tersebut dapat dikuatkan dalam struktur untuk kemudian menjadi semacam gerakan baru bagi pembangunan kelautan dan perikanan di daerah ini. Terkesan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara lebih fokus mengurus tarikan kepentingan kebijakan yang ada dengan mengembangkan wacana, namun abai merawat kultur/tradisi yang telah hidup lama. Padahal, pembangunan perikanan merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan, yang di dalamnya terdapat modal budaya untuk dikembangkan. Bahkan, bila dikelola secara lebih baik, persoalan perikanan akan memberi dampak ikutan bagi banyak bidang lain, salah satunya, pariwisata kuliner di Maluku Utara yang masih terbilang belum berkembang secara baik.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluatif yang mengkaji proses Pembentukan Program Lumbung Ikan Nasional (LIN) dengan menggunakan data hasil wawancara, serta informasi dari koran lokal tahun 2018-2019.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Potensi Berlimpah, Miskin Inovasi

Maluku Utara memiliki produksi perikanan laut (tangkap) sebesar 286.629,486 ton (lihat Maluku Utara Dalam Angka, 2019). Sementara potensi yang tersedia untuk perikanan tangkap, mengikuti data lama, sebesar 1.035.230 ton per tahun, di mana potensi lestari sebesar 517.000 ton per tahun, dari potensi tersebut yang baru dimanfaatkan sebesar 150.232 ton per tahun atau 29%. Dengan potensi sebesar itu, ternyata belum memberikan hasil maksimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan Maluku Utara. Tidak hanya itu, potensi besar itu juga belum banyak menyumbang bagi pembangunan daerah. Tentu, ini menjadi persoalan mendasar, di tengah kekayaan alam (laut) yang demikian melimpah, namun Maluku Utara belum mampu menjadikannya sebagai “kekuatan” dan nilai tawar untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi produksi komoditas yang dibanggakan.

Tidak hanya potensi kelautan, yang perlu diperhatikan adalah dukungan armada, dan juga nelayan yang memadai untuk menjawab cita-cita besar mewujudkan Maluku Utara sebagai lumbung ikan. Dukungan nelayan dan armada di Maluku Utara (data 2013) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Nelayan dan Armada di Maluku Utara

No	Kabupaten/Kota	Nelayan	Armada
1	Halmahera Selatan	2.810	375
2	Halmahera Utara	2.522	321
3	Halmahera Timur	848	180
4	Halmahera Barat	1.365	252
5	Halmahera Tengah	973	166
6	Sula Kepulauan*)	1.333	245
7	Pulau Morotai	749	152
8	Tidore Kepulauan	2.134	262
9	Ternate	2.551	285

Sumber : PPN Ternate, 2013

\*) Data Sula masih gabung dengan Taliabu

<sup>1</sup> Di tahun 2019 lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ditagih Pemerintah Provinsi Maluku yang berjanji menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, namun tidak terwujud (lihat, [https://www.mongabay.co.id/2019/09/06/perang-gubernur-maluku-karena-kesal-tak-kunjung-jadi-lumbung-ikan-nasional/06 September 2019](https://www.mongabay.co.id/2019/09/06/perang-gubernur-maluku-karena-kesal-tak-kunjung-jadi-lumbung-ikan-nasional/06%20September%202019))

Status sebagai wilayah produksi ikan, bagi Maluku Utara, mungkin merupakan upaya keras yang harus didorong lebih serius, di tengah berbagai keterbatasan dan kelemahan. Namun, persoalan yang hadir kemudian, apa dan bagaimana keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang dimiliki Maluku Utara bila dibanding daerah lain yang mungkin saja justru memiliki potensi sama, namun diperhitungkan secara nasional dan internasional. Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Utara, misalnya, justru sudah pada tingkat ekspor ke mancanegara dan bahkan lebih dikenal sebagai pemasok ikan-ikan bermutu tinggi.

Padahal, menurut salah satu pengusaha ikan asal Ternate, (F, 42 thn), permintaan ikan di Maluku Utara sangat tinggi, namun kelemahan Maluku Utara belum ada pabrik olahan ikan, sementara Bitung ada delapan perusahaan pengalangan (wawancara, 04 Juli 2015). Pertanyaan kemudian yang mengemuka sejauh mana tekad pemerintah menghadirkan infrastruktur, berupa pabrik pengolahan ikan secara serius di daerah ini. Realitas di atas mengisyaratkan, bahwa menghadirkan Maluku Utara sebagai lumbung ikan, tidak sekadar membutuhkan kerja keras, tetapi lebih dari itu, kesadaran untuk memanfaatkan potensi yang berlimpah menjadi sesuatu yang niscaya perlu didahulukan.

### 3.2. Sebuah Tinjauan Sosiologi : Struktural, Kultural, Proses Sosial

Sebagai wilayah yang dikaruniai Tuhan potensi laut yang demikian besar, Maluku Utara memiliki sebuah kekuatan untuk dapat mengelola potensinya secara memadai. Dengan menggunakan perspektif struktur, kultur, dan proses sosial (Wirutomo, 2011), kajian ini mencoba melihat sisi yang lain mengenai kekuatan potensi yang dimiliki Maluku Utara. Struktural merupakan elemen dasar yang membentuk suatu keteraturan dari kehidupan sosial (*social life*). Struktur merupakan setiap tindakan atau alat yang digunakan pihak berkuasa untuk dapat mengatur, mengendalikan, memerintah hingga mengeksploitasi. Karena itu, struktur sosial merupakan pola hubungan antara kelompok sosial, yang memiliki sifat mengatur, menghambat, dan memberi kendala, namun sekaligus juga memberi fasilitas pada tindakan manusia (aktor).

Kandungan struktural di atas memerlukan penguatan melalui elemen berupa : kebijakan pemerintah; program pemerintah; anggaran pembangunan; proyek pemerintah. Selain itu juga terdapat struktural yang tidak resmi dari aspek fisik yakni struktur demografi (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, komposisi penduduk); termasuk lokasi yang strategis yang perlu diperhitungkan. Secara kultural, Maluku Utara memiliki sistem nilai, norma, sistem kepercayaan dan semua kebiasaan serta adat istiadat, yang telah mendarah daging (*internalized*) pada sistem kepribadian individu/ masyarakat sehingga memiliki sebuah 'kekuatan' membentuk dan menjadi pedoman pada pola perilaku dan sikap anggota masyarakat (terutama dari dalam). Karenanya, karakter masyarakat Maluku Utara boleh disebut merupakan karakter masyarakat pesisiran (kepulauan) yang memiliki pola (*pattern*) tersendiri. Bagaimana kekayaan alam tersebut dinikmati (aspek konsumtif), dirawat, dijaga, tetapi sekaligus juga menghidupkan (aspek produktif).

Tentunya, secara kultural perlu didukung elemen yang menopangnya. Apakah sistem kepercayaan, tradisi/adat istiadat, juga kebiasaan-kebiasaan tersebut hanya sebagai wacana semata dan belum terinternalisasi. Bagaimana dengan budaya (kebiasaan) lokal seperti memancing, menangkap ikan yang hanya untuk dikonsumsi semata, namun belum menjadi nilai produksi sebagai komoditi. Demikian juga kebiasaan makan ikan yang belum terlalu kuat, dibanding kebiasaan mengkonsumsi *junkfood*, yang sekarang begitu fenomenal sebagai sebuah tradisi konsumsi masyarakat Maluku Utara. Ada pergeseran dari makan ikan ke makan ayam lalap. Adapun proses sosial, yang merupakan arena menjadi sumber perubahan struktur maupun kultur (*social order is a negotiated order*). Yang diharapkan terjadi adalah negosiasi dinamis dan kreatif antar anggota masyarakat, mengembangkan kualitas dan kuantitas ruang serta kesempatan untuk berlangsungnya proses sosial yang dinamis.

Yang menjadi persoalan, adakah elemen proses sosial yang mendukungnya atau tidak. Elemen tersebut meliputi : adakah interaksi antara masyarakat/ komunitas nelayan dalam melakukan kesepakatan untuk membuat suatu perubahan) menjadi lebih baik. Adakah interaksi antar komponen masyarakat dengan aparat pemerintah berkaitan dengan upaya melakukan perubahan dari sekadar mengkonsumsi menjadi sesuatu yang produktif; apakah terdapat kesempatan berdiskusi dan berwacana yang terbuka : entah di warung kopi, di lokasi kegiatan, kegiatan pelatihan sampai seminar;

adakah kesempatan bernegosiasi untuk melakukan perubahan terhadap struktur (aturan) dan kultur (kebiasaan) masyarakat.

Padaحال konsumsi, menurut Warde (1997) secara sosiologis berfungsi sebagai produksi, di mana pola konsumsi juga menentukan posisi kelas secara wajar. Konsumsi merupakan ekspresi pusat hirarki sosial dari ketidaksetaraan sumber daya manusia yang dapat berubah menjadi alat dan status perjuangan kelas. Mengonsumsi ikan belum menjadi sebuah ekspresi dan status perjuangan, kita masih "tunduk" pada pola konsumsi makan ayam lalap.

### 3.3. Menggeser Kesadaran : Sebuah Tawaran Solusi

Dalam kehidupan sosial terdapat dua kesadaran, yakni kesadaran praktis dan kesadaran diskursif (Giddens, 1984). Kesadaran praktis dapat berupa tindakan berulang-ulang (rekursif) yang tidak memerlukan proses reflektif (perenungan) dan tidak ada "pengambilan jarak" oleh aktor/masyarakat terhadap struktur (kebiasaan yang sudah terbentuk). Misalnya, kebiasaan makan ayam lalap, atau selain ikan, yang dilakukan secara terus menerus, tanpa ada kesadaran bahwa tindakan itu sebenarnya kurang baik bagi kesehatan, di mana semua orang melakukan hal yang sama, tatkala semua orang melakukan hal yang sama dan menjadi rutinitas keseharian, maka tindakan tersebut makin menguatkan dan memperjelas bahwa itu sudah menjadi tatanan yang berlaku (sudah membentuk struktur).

Sedangkan kesadaran diskursif tatkala seorang aktor, anggota masyarakat "mengambil jarak" dari struktur (kebiasaan yang sudah terbentuk) serta melakukan suatu tindakan dengan mencari makna lain dari tindakannya tersebut. Maka, kesadaran akan terjadi, jika semakin banyak aktor/masyarakat yang menyadari kesalahan itu. Misal, Ketika semua orang makan ayam lalap, harus ada aktor yang "menyimpang" dengan makan ikan. Keluar dari kebiasaan lama. Ini harus menjadi *branding* sekaligus identitas bagi masyarakat Maluku Utara, bahwa mengonsumsi ikan harus menjadi tradisi. Konsumsi ikan harus menjadi tuan di rumah sendiri, sekaligus harus menjadi nilai produktif. Aktor yang telah mampu melakukan refleksi akan dapat memberikan makna lain dari tindakannya. Kekuatan aktor (kesadaran diskursif) adalah untuk merubah masyarakat melalui proses sosial. Pekerjaan ini yang harus dilakukan kita semua dalam rangka mendukung Maluku Utara sebagai lumbung ikan.

Meningkatkan kesadaran diskursif masyarakat selain melalui pengetahuan, juga membangun jaringan kerja antar individu yang memiliki kesadaran diskursif, baik pada tingkat individu/tingkat komunitas hingga tingkat aparat pemerintah. Di mana hasil pengetahuan yang telah diperoleh, akan diproduksi dalam praktik kehidupan sosial. Karena itu, diperlukan pembentukan kelembagaan (institusionalisasi) pada tingkat masyarakat nelayan untuk menjadi ajang proses sosial dalam membangun kesadaran diskursif pada lingkup yang lebih luas. Pada tingkat yang lebih tinggi dapat menjadi ajang proses sosial guna melakukan perubahan.

Kebiasaan makan ayam lalap atau selain ikan misalnya, juga dipandang sebagai konsumsi yang murah meriah dibanding harus mengonsumsi ikan yang harganya demikian mahal. Bukankah harga ikan yang demikian mahal dalam beberapa tahun ikut menyumbang inflasi bagi daerah ini? Di sini kemudian, dibutuhkan kehadiran pemerintah daerah untuk melakukan "intervensi" pasar dalam menetapkan harga ikan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat. Persoalan kemudian, ketika harga ikan melambung, sama sekali tidak terasa kehadiran pemerintah di sana.

Untuk itu, wacana tentang perspektif industrialisasi perikanan yang pernah digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sherif Cicip Soetardjo di tahun 2011 tidak ada salahnya untuk dikaji kembali. Hal ini mengingat industrialisasi perikanan dalam arti sempit, yakni membangun pabrik-pabrik pengolahan ikan dengan tujuan meningkatkan produksi ikan olahan baik untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Sementara industrialisasi perikanan dalam arti luas adalah transformasi ke arah perikanan yang bernilai tambah, tujuannya meningkatkan nilai tambah produksi perikanan lokal yang dapat dinikmati pelaku di hulu dan hilir sehingga menghidupkan nelayan dan pembudidayaan ikan (Satria, 2015).

## IV. PENUTUP

Mimpi dan cita-cita besar menjadikan Maluku Utara sebagai lumbung ikan bukan tidak mungkin dapat tercapai, apabila pemerintah dapat hadir untuk memberi "kepastian kebijakan dan tindakan" dengan menyiapkan infrastruktur pendukung yang memadai, dapat hadir ketika masyarakat

membutuhkan peran dan “campur tangan” untuk mendorong pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik. Karena itu, pelembagaan pada tingkat komunitas nelayan merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Hal yang paling penting adalah, menggeser kesadaran untuk menjadikan ikan sebagai komoditi utama, dan tidak sekadar hanya sebagai pelengkap untuk dikonsumsi. Kesadaran ini harus konsisten dijalankan, dan itu harus dimulai dari pemerintah daerah sebagai titik tolak hendak mengembangkan Maluku Utara sebagai wilayah lumbung ikan yang disegani dan dihormati.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ambari, M., (2019), ‘Perang’ Gubernur Maluku Karena Kesal Tak Kunjung Jadi Lumbung Ikan Nasional, dalam <https://www.mongabay.co.id/2019/09/06/perang-gubernur-maluku-karena-kesal-tak-kunjung-jadi-lumbung-ikan-nasional/06-September-2019>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, (2019), Maluku Utara Dalam Angka 2019, diterbitkan BPS Provinsi Maluku Utara.
- Giddens, Anthony, (1984), *The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration*, University of California Press : Berkeley and Los Angeles
- Satria, Arif, (2015), *Politik Kelautan dan Perikanan, Catatan Perjalanan Kebijakan Era SBY Hingga Jokowi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Warde, Alan, (1997), *Consumption, Food, and Taste, Culinary Antinomies and Commodity Culture*, Sage Publication : London.
- Wirutomo, Paulus, (2011); “Social Development Policies on Informal Sector in Solo,” In *International Journal of Administrative Science & Organization*, Vol. 18, No. 2, May.